

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PADA KASUS KORUPSI RAFAEL ALUN TRISAMBODO

Andi Nasywan Taghsya, Muhammad Nahdy Arrosyid, dan Rana Imran Shaukat
Faculty of Administration, Public Administration, University of Indonesia, Jl. Lingkar, Pondok Cina,
Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia.
E-mail: andinasywan78@gmail.com, nahdyarrosyid16@gmail.com,
ranashaukatwork2004@gmail.com

Abstract

This research explores the ethical and moral dimensions surrounding the corruption scandal involving the Minister of Agriculture in Indonesia. Even though it is a government institution responsible for public services, the government often fails to fulfill the principles of transparency, accountability and credibility. This case study focuses on the Minister's abuse of authority for personal gain, highlighting the need for deeper examination of ethical and moral violations in government practices. This research explores the motives and factors that contribute to corruption, recognizing the far-reaching consequences for both the state and the public's trust in government. Therefore, this research recommends implementing ethical values in governance to encourage a government that is free of corruption and has high morals.

Keywords: Ethics, Corruption.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika yang terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan seorang individu yang seharusnya bertanggung jawab atas keuangan publik namun terlibat dalam tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Metode analisis menggunakan pendekatan etika untuk mengeksplorasi aspek-aspek kebijakan, tata kelola, dan integritas yang terlibat dalam tindakan korupsi tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan sejumlah pelanggaran etika yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo, termasuk penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan dana publik, dan manipulasi informasi. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku koruptifnya juga disajikan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang akar permasalahan. Implikasi dari pelanggaran etika ini terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tantangan etika dalam pencegahan korupsi di tingkat individu dan organisasional. Kesimpulan mengajukan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat nilai-nilai integritas guna mencegah pelanggaran etika serupa di masa depan. Studi ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas terkait upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola keuangan publik di tingkat lokal maupun nasional.

Kata Kunci: Etika, Korupsi.

PENDAHULUAN

Etika adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengatur cara manusia melakukan kegiatan sehari-harinya. Dalam setiap kegiatan manusia, ada seperangkat etika yang telah diciptakan oleh masyarakat sesuai dengan apa yang dirasa oleh masyarakat akan menuntun pekerjaan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Begitu pula pada proses birokrasi. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan birokrasi ada etika-etika yang menuntun para birokrat dan administrator menuju suatu bentuk tertentu. Etika dalam administrasi publik umumnya beragam dan berbeda diantara setiap instansi pemerintah, karena setiap instansi memiliki visi, misi, tujuan, dan budaya yang berbeda satu sama lain. Walau begitu, setiap perangkat etika tetap menuntun ke arah yang sama, mengarahkan agar pekerjaan terlaksana dengan cara yang baik. Karena itu, pelanggaran etika pada organisasi manapun dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak bijak. Sepenting apapun etika, pada faktanya masih terjadi pelanggaran etika dalam instansi-instansi pemerintah, padahal sudah diketahui bahwa bila etika dilanggar maka kemungkinan besar efektivitas dan efisiensi pekerjaan akan terganggu, artinya pelayanan publik akan terancam menurun dalam kualitas. Dalam makalah ini, kami sebagai penulis akan menganalisis pelanggaran-pelanggaran etika pada instansi pemerintah, khususnya pada seorang

individu bernama Rafael Alun Trisambodo. Terdapat berbagai macam etika, contohnya mulai dari etika normatif, etika deskriptif, etika profesi, etika individu, dan juga ada etika sosial. Masing-masing jenis etika mengatur sebuah aspek tertentu dalam kehidupan, seperti dipengaruhinya cara komunikasi antar anggota sebuah organisasi oleh etika-etika sosial. Mengikuti contoh tersebut, bila seorang anggota melanggar etika sosial dengan berkomunikasi dalam cara tertentu, maka anggota tersebut akan menemui konsekuensi tertentu, seperti melambatnya proses komunikasi, engganannya anggota lain untuk melakukan komunikasi, ataupun menurunnya kualitas komunikasi itu sendiri. Analisis kasus kami misalnya, menemukan bahwa Rafael Alun Trisambodo, di antara etika lain telah melanggar etika profesi dengan melakukan gratifikasi.

Dalam esai kami, setelah melakukan analisis, kami menemukan dan mengklasifikasikan pelanggaran-pelanggaran etika di birokrasi Indonesia secara umum menurut teori etika yang telah kami pelajari di mata kuliah filsafat dan etika administrasi. Kemudian, untuk contoh praktis kami telah mengambil seorang tokoh birokrat berupa Rafael Alun Trisambodo untuk melakukan analisis kasus terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang telah dia lakukan. Temuan riset kami menunjukkan bahwa Rafael Alun Trisambodo telah melakukan pelanggaran berbagai jenis etika. Ini terkait dengan fakta bahwa Rafael Alun Trisambodo telah ditemukan melakukan pencucian uang, pengambilan gratifikasi, dan penghindaran pajak. Sebagai seorang pejabat di pemerintahan, Rafael Alun Trisambodo berada di bawah mata rakyat, dan tindak lakunya kemungkinan besar akan mempengaruhi persepsi masyarakat pada instansi pemerintahan.

Apabila Rafael Alun Trisambodo dan birokrat-birokrat instansi pemerintah lainnya tetap melakukan pelanggaran etika, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah dapat menurun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai hasil dari penurunan kualitas layanan. Selain dampak tersebut, kami juga telah menemukan dampak-dampak lain dari pelanggaran etika demi memahami lebih lanjut urgensi mematuhi etika yang ada dalam organisasi. Pada akhir makalah kami, telah kami tuliskan saran-saran bagi instansi pemerintahan di Indonesia dalam memperbaiki kepatuhan pada etika.

TINJAUAN TEORITIS

Dalam Etika Administrasi terdapat beberapa teori di dalamnya. Yang pertama ada teori etika normatif, etika ini berfokus kepada standar penilaian atas benar atau salahnya suatu tindakan. Dalam konteks administrasi, keputusan etis wajib dibuat lewat pertimbangan tugas serta kewajiban seseorang bersama dengan hak individu lain. Yang kedua ada teori etika deskriptif, teori etika ini bertujuan kepada penggambaran empiris atas sistem moral seseorang atau sekelompok orang. Dalam administrasi, etika administrasi ini membahas bagaimana prinsip-prinsip etis, terutama dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, dan diterapkan dalam konteks sehari-hari. Yang ketiga ada teori etika profesi, etika ini menekankan kepada peran profesional dalam etika administrasi. Dalam konteks administrasi, profesional wajib memiliki karakter serta kebajikan yang sesuai dengan tugasnya. Yang keempat ada teori etika organisasi, etika ini mengulas bagaimana prinsip-prinsip etis dipakai dalam organisasi. Dalam konteks administrasi, etika organisasi mempengaruhi bagaimana organisasi dikelola serta beroperasi. Yang kelima ada teori etika individu, etika ini menekankan pada peran para individu dalam etika administrasi. Dalam konteks administrasi, setiap individu wajib mempunyai kebijakan serta prinsip etis yang jelas dan tetap dipakai dalam keputusan serta perilaku mereka. Yang keenam ada teori etika sosial, dalam etika ini membahas bagaimana etika administrasi berkaitan dengan hubungan sosial serta komunikasi antar individu dan organisasi. Dalam administrasi, etika sosial ini memengaruhi bagaimana hubungan sosial serta komunikasi antar pemangku keputusan serta penerimaan. Teori yang terakhir yaitu teori etika kehidupan, etika

ini meng highlight kepada bagaimana etika administrasi terkait dengan kehidupan manusia secara menyeluruh. Di dalam konteks administrasi, etika kehidupan membahas bagaimana prinsip prinsip etis ini diterapkan dalam kehidupan sehari harinya.

Dalam kasus rafael alun yang kami bahas ini, kami menemukan kecocokan dalam beberapa teori yang ada untuk membahas kasus ini. Teori pertama yang kami pakai yaitu teori etika normatif, kami memakai teori etika ini karena berpegang kepada benar atau salahnya suatu tindakan, yang akan menilai tindakan rafael alun itu benar atau salah. Teori kedua yang kami gunakan yaitu teori etika deskriptif, kami juga menggunakan teori ini untuk membahas kasus rafael alun karena membahas dari sistem moral nya dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dalam sehari hari. Teori ketiga yang akan kami gunakan yaitu teori etika kehidupan, kami gunakan ini untuk membahas kasus rafael alun terkait bagaimana etika administrasi berhubungan dengan kehidupan sehari hari. Teori keempat yang akan kami gunakan yaitu teori etika sosial, karena akan mempengaruhi hubungan sosial yang ada antara pejabat dan masyarakat. Teori kelima yang akan kami gunakan yaitu teori etika profesi, kami menggunakan teori etika ini dikarenakan berhubungan dengan keprofesionalan seorang pejabat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Teori keenam yang akan kami gunakan yaitu teori etika individu, kami juga menggunakan teori etika ini dikarenakan seorang pejabat atau individu ini wajib mempunyai kebijakan serta prinsip etis yang jelas dan tetap dipakai dalam keputusan serta perilaku mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi pelanggaran etika dalam kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo mengambil dasar pada tiga pendekatan utama: penelusuran jurnal, analisis dokumen, dan pemantauan berita. Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran rinci tentang peristiwa tersebut. Penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah yang mendalam, dokumen resmi seperti laporan investigasi, dan berita terkini yang memberikan pemahaman kontekstual.

Studi pustaka menyelidiki literatur etika, korupsi, dan kasus serupa untuk membentuk landasan teoritis yang diperlukan. Dengan merinci kerangka konseptual, penelitian ini mampu mengaitkan temuan-temuan lapangan dengan teori-teori yang ada, memperkaya analisis dan pemahaman terhadap pelanggaran etika dalam konteks kasus Rafael Alun Trisambodo.

Proses analisis konten menjadi langkah kunci dalam menggali informasi dari berbagai sumber. Kami melakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi pola perilaku dan implikasi etika yang muncul dalam perjalanan kasus korupsi tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami dampak pelanggaran etika secara menyeluruh.

Validitas penelitian ditingkatkan dengan menerapkan triangulasi data, yaitu dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Dengan cara ini, penelitian ini mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap temuan dan analisis yang dihasilkan. Sementara itu, fokus pada etimologi dan keterbukaan menjadi kunci untuk memahami akar penyebab pelanggaran etika dan menerima berbagai sudut pandang yang mungkin berbeda.

Dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan, kami berupaya mendalami berbagai sudut pandang terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo dalam kasus korupsinya. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menggambarkan kompleksitas dan dampak pelanggaran etika dalam konteks kasus tersebut, serta menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

Pelanggaran etika pada instansi pemerintahan sesungguhnya tergantung pada etika apa yang ada dalam instansi pemerintahan tersebut, karena yang merupakan sebuah pelanggaran etika di suatu instansi mungkin bukan menjadi masalah di instansi lainnya. Contohnya adalah dalam Sapta Marga TNI sebagai kode etik profesi, terdapat satu poin yang membentuk TNI menjadi individu yang patuh dan taat terhadap pimpinan (Pengadilan Militer Bandung, 2015). Bila seorang tentara melakukan pelanggaran terhadap poin tersebut, maka keberlangsungan organisasi TNI dapat terancam. Pada sisi lain, etika ASN, secara spesifik etika ASN dalam berorganisasi, mendorong ASN untuk berpikir kreatif dan untuk melakukan inovasi (Pengadilan Militer Utama, 2022). Dari kedua kenyataan tersebut didapat bahwa etika tidak selalu sama pada setiap instansi pemerintah, dan sebuah tindakan pelanggaran etika pada sebuah instansi, pada instansi lain dapat menjadi sesuatu yang justru dianjurkan oleh etika. Walau begitu ada beberapa hal yang pada setiap instansi pemerintah menjadi etika, dan itu dapat dikatakan sebagai nilai-nilai yang baik secara universal. Dengan melihat nilai-nilai etika yang cenderung sama muncul dalam setiap instansi pemerintah, dapat dikatakan bahwa itu adalah nilai-nilai yang bila diterapkan maka organisasi akan berjalan dengan baik. Dapat dikatakan juga, bila seorang ASN atau PNS manapun melanggar etika universal itu, maka dapat dikatakan bahwa ia sedang merugikan organisasinya.

Menurut teori etika, etika sendiri diklasifikasikan menjadi kategori-kategori, yaitu etika normatif, etika deskriptif, etika profesi, etika individu, dan juga etika sosial. Dari pernyataan tersebut, contoh pelanggaran etika profesi dalam instansi pemerintah diantaranya berupa korupsi dan pengambilan gratifikasi, pemalsuan data dan ketidakjujuran, dan juga ketidaktanggungjawaban, dengan kasus seperti kasus suap jaksa Arsa Tri Gunawan, kasus suap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Santoso (Dewi, 2021), serta tentunya kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun Trisambodo sudah terlibat pada aneka macam pelanggaran etika yang bisa dianalisis dari aneka macam perspektif etika, termasuk etika normatif, etika deskriptif, etika kehidupan, etika sosial, etika profesi, serta etika individu. pada penerangan ini, kami akan membahas pelanggaran etika yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo sesuai keenam perspektif tersebut.

Pada konteks etika normatif, Rafael Alun Trisambodo melanggar prinsip-prinsip moral yang diakui secara awam. salah satu pelanggaran etika normatif yang dilakukan adalah korupsi. Rafael Alun Trisambodo terlibat pada masalah penyalahgunaan kekuasaan serta penyelewengan dana publik, yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab publik. Pelanggaran semacam ini tak hanya melanggar aturan, namun juga Mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta lembaga publik.

Dari perspektif etika deskriptif, pelanggaran etika Rafael Alun Trisambodo bisa ditinjau dalam konteks sikap manusia dalam masyarakat. salah satu model pelanggaran etika deskriptif yang dilakukan merupakan penyebaran berita yang tak akurat atau hoaks. sebagai tokoh publik, Rafael Alun Trisambodo mempunyai efek yang besar terhadap masyarakat. oleh sebab itu, penyebaran informasi yang tak akurat atau hoaks bisa mengakibatkan kebingungan, ketidakpastian, serta bahkan perseteruan di antara masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip integritas serta tanggung jawab dalam memberikan informasi yang benar serta bisa dipertanggungjawabkan.

Pada konteks etika kehidupan, Rafael Alun Trisambodo melanggar nilai-nilai serta prinsip etika yang wajib diterapkan pada kehidupan sehari-hari. salah satu pelanggaran etika kehidupan yang dilakukan ialah penggunaan kekerasan atau ancaman buat mencapai tujuan politik atau pribadi. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip keselamatan, keadilan,

serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penggunaan kekerasan atau ancaman tak bisa dibenarkan dalam konteks etika kehidupan yang mengutamakan perdamaian, keadilan, serta kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif etika sosial, Rafael Alun Trisambodo melanggar norma-norma sosial yang terdapat pada masyarakat. salah satu pelanggaran etika sosial yang dilakukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan guna kepentingan pribadi atau grup tertentu. Tindakan semacam ini Mengganggu keadilan sosial, mengabaikan kepentingan umum, serta memperkuat kesenjangan sosial. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, serta kepentingan bersama pada konteks etika sosial.

Pada perspektif etika profesi, Rafael Alun Trisambodo melanggar prinsip-prinsip etika yang wajib diikuti dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya sebagai tokoh publik. salah satu pelanggaran etika profesi yang dilakukan merupakan penyalahgunaan wewenang serta kepercayaan publik guna meraih keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan semacam ini Mengganggu integritas serta profesionalisme yang dibutuhkan dari seorang tokoh publik.

Pada konteks etika individu, Rafael Alun Trisambodo melanggar nilai-nilai serta prinsip etika dalam tindakan individu yang dilakukannya. salah satu pelanggaran etika individu yang dilakukan ialah kurangnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Selain itu, Rafael Alun Trisambodo juga melanggar prinsip tanggung jawab pribadi serta akuntabilitas atas tindakan dan keputusan yang diambilnya.

Melalui penerangan di atas, bisa disimpulkan bahwa Rafael Alun Trisambodo sudah melanggar aneka macam prinsip etika dari perspektif etika normatif, etika deskriptif, etika kehidupan, etika sosial, etika profesi, serta etika individu. Pelanggaran tadi meliputi korupsi, penyebaran informasi tidak akurat atau hoaks, penggunaan kekerasan atau ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya integritas serta kejujuran, dan kurangnya tanggung jawab pribadi serta akuntabilitas. Pelanggaran etika semacam ini Mengganggu kepercayaan rakyat, merugikan kepentingan umum, serta melanggar prinsip-prinsip moral yang diakui secara umum. oleh sebab itu, sangat krusial untuk mematuhi prinsip-prinsip etika yang berlaku supaya bisa menjaga keadilan, integritas, serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Dampak dari korupsi, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan undang-undang, sangat merugikan keuangan negara, perekonomian, dan pembangunan nasional. Undang-undang nomor 3 tahun 1971 dan nomor 31 tahun 1999 menegaskan perlunya memberantas tindak pidana korupsi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dalam teori, dampak korupsi mencakup kerusakan sistem dan tatanan masyarakat, penderitaan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, administrasi, politik, dan hukum. Drs. Soejono Karmi mengemukakan bahwa norma-norma masyarakat dapat dirusak oleh persekongkolan yang didukung oleh publik. Penderitaan sebagian besar masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum, dapat terjadi. Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, menyatakan bahwa korupsi menimbulkan biaya tinggi, meningkatkan tingkat kemiskinan, dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi saat ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang perlu diberantas dengan langkah-langkah luar biasa pula.

Dalam menjelajahi kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan Rafael Alun, penting untuk menyoroti dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika yang mungkin terjadi. Etika memainkan peran kunci dalam membentuk tata nilai sosial dan integritas individu, dan ketika seorang aktor, seperti Rafael Alun, terlibat dalam pelanggaran etika, dampaknya dapat meluas ke berbagai lapisan masyarakat.

Pertama-tama, dampak terbesar mungkin terasa pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan pemerintah. Kasus pelanggaran etika dalam konteks korupsi cenderung merusak integritas lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan tugasnya untuk kepentingan umum. Rakyat yang semula mempercayai sistem dapat merasa kecewa dan meragukan integritas penyelenggaraan negara. Ini menciptakan ketidakstabilan dalam fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merupakan elemen kritis dalam menjaga stabilitas sosial. Public trust terhadap pemerintah dapat hilang sehingga masyarakat memiliki keraguan saat mereka membayar pajak, hal ini akan mendorong pemikiran masyarakat untuk tidak mau lagi membayar pajak kepada pemerintah karena khawatir akan dikorupsi.

Selain itu, dampak dari pelanggaran etika oleh Rafael Alun dapat merambah ke sektor ekonomi. Praktik korupsi cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Hal ini dapat merugikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan merugikan sektor bisnis yang tidak terlibat dalam praktik korupsi. Investasi asing juga dapat terpengaruh karena ketidakpastian yang dihasilkan dari tindakan korupsi, menghambat potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya, aspek hukum dan keadilan juga dapat terpukul oleh pelanggaran etika dalam kasus ini. Ketika tokoh-tokoh kunci seperti Rafael Alun terlibat dalam tindakan korupsi, hal tersebut dapat menghancurkan integritas sistem hukum. Dalam banyak kasus, korupsi dapat menciptakan celah dalam penegakan hukum dan menyebabkan impunitas. Ini merugikan upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan konsekuensi serius bagi penghormatan terhadap aturan hukum. Dari kasus ini masyarakat berpotensi untuk hilangnya rasa percaya terhadap aparat penegak hukum dikarenakan kasus korupsi terjadi secara berulang kali.

Dengan merinci dampak-dampak ini, kita dapat memahami bahwa pelanggaran etika dalam kasus korupsi Rafael Alun tidak hanya merugikan secara langsung individu yang terlibat, tetapi juga merambah ke dalam struktur masyarakat dan sistem yang lebih luas. Ini menegaskan perlunya tindakan preventif dan korektif untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika dan keadilan dijunjung tinggi, serta membangun fondasi yang kuat untuk memastikan integritas dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan dari analisis terhadap pelanggaran etika dalam kasus Rafael Alun Trisambodo menyoroti dampak serius yang dapat melibatkan berbagai aspek masyarakat. Dalam konteks ini, korupsi dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat tinggi seperti Rafael Alun memiliki implikasi mendalam yang dapat mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.

Pertama-tama, terjadinya pelanggaran etika oleh Rafael Alun dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan institusi publik. Dalam situasi ini, ketidakpercayaan masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik. Kehilangan kepercayaan ini tidak hanya mempengaruhi citra pemerintah, tetapi juga dapat memicu ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma-norma sosial.

Dampak ekonomi juga menjadi sorotan, di mana praktik korupsi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi. Investasi asing juga dapat terpengaruh, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pelanggaran etika seperti korupsi merugikan sektor bisnis yang tidak terlibat dalam praktik tersebut, menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan tidak berdaya saing.

Selanjutnya, aspek hukum dan keadilan juga terdampak, di mana pelanggaran etika menciptakan celah dalam penegakan hukum dan dapat menyebabkan impunitas. Ini dapat merusak integritas sistem hukum dan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap

keadilan. Keberlanjutan pelanggaran etika semacam ini dapat membahayakan fondasi hukum yang merupakan landasan masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Dalam masyarakat, pelanggaran etika seperti yang dilakukan oleh Rafael Alun dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Ketidaksetaraan yang dihasilkan dari korupsi dapat menciptakan ketegangan sosial dan merugikan lapisan masyarakat yang lebih lemah. Masyarakat yang merasa dianiaya oleh tindakan korupsi dapat menjadi sumber konflik dan tidakstabilitas sosial.

Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa pelanggaran etika, terutama korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, memiliki dampak yang jauh melampaui individu yang terlibat. Dampaknya mencakup kepercayaan masyarakat, stabilitas ekonomi, keadilan hukum, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penindakan, dan perbaikan sistem sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika dijunjung tinggi, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga. Hanya dengan tindakan tegas dan komprehensif, masyarakat dapat berharap untuk membangun negara yang adil, bermoral, dan berkeadilan.

Untuk meminimalisir dan mencegah pelanggaran etika sejenis yang melibatkan pejabat publik seperti Rafael Alun Trisambodo, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama-tama, perlu ditingkatkan lagi sistem pengawasan dan audit internal di semua tingkatan pemerintahan. Penguatan ini melibatkan peningkatan kapasitas auditor internal, penerapan teknologi untuk deteksi dini, dan kebijakan yang mendorong transparansi.

Selain itu, perlunya peningkatan integritas dan moralitas melalui pelatihan etika bagi pegawai pemerintah. Pembekalan ini dapat membantu membangun kesadaran akan konsekuensi pelanggaran etika, serta menguatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas publik.

Penting juga untuk memperkuat peran media massa sebagai penjaga kebenaran dan pengawas kebijakan pemerintah. Mendukung kebebasan pers dan memastikan media memiliki akses yang bebas untuk melaporkan dugaan korupsi atau pelanggaran etika dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran etika dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga kejujuran dan akuntabilitas.

Terakhir, perlu adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran etika. Proses hukum harus berjalan tanpa intervensi politik, dan penegakan hukum harus bersifat adil dan cepat sehingga dapat menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang memiliki niat untuk melanggar etika dalam menjalankan tugas publik. Dari saran - saran ini diharapkan dapat membuat lembaga yang berkecimpung pada kepentingan publik dan para aktornya dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan dapat terhindar dari kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dampak Kasus Rafael Alun, Wapres Minta: Jangan Sampai Orang Tak Mau Bayar Pajak. (2023, March 1). ERA.ID. Retrieved December 4, 2023, from <https://era.id/nasional/119614/dampak-kasus-rafael-alun-wapres-minta-jangan-sampai-orang-tak-mau-bayar-pajak>
- Kode Etik Aparatur Sipil Negara. (2022, June 22). Dilmiltama.go.id. Retrieved December 5, 2023, from <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik- Aparatur-sipil-negara.html>
- Kode Etik Profesi TNI. Dilmil-Bandung.go.id. Retrieved December 5, 2023, from <https://dilmil-bandung.go.id/kode-etik-profesi-tni/>

- Cahyani, R. N., Etnika, S., Nareswari, H., Evelyn, N., & Anggoro, W. B. (2023). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Oleh Rafael Alun Trisambodo. *House of Management and Business (HOMBIS) Journal*, 2(1), 18-29.
- Daeng, Y., Noverto, N., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7885-7894.
- Dewi, Lies Kumoro (2021). Pelanggaran Etika Biokrasi dalam Pemerintahan di Indonesia. *Business Perspective Journal*, 1(1), 84-93.
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia.